

**PPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mastri Susilo  
Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih  
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Januari 2026

KETUA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA PERWAKILAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Mokhammad Najih



Mastri Susilo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

| SASARAN                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                     | TARGET               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif               | Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan                                                                                                         | 181 Laporan          |
|                                                                                  | Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik | 1 Laporan            |
| Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik | Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik                                                                                          | 18 Pemerintah Daerah |
| Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas        | Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor                                                                                                                        | 1 Layanan            |

| NO.       | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT                                                                                                            | ANGGARAN              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I</b>  | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik</b>                                                                                 |                       |
| <b>A</b>  | <b>Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat</b>                                                                                   |                       |
| 1         | Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan                                                             | Rp 230.830.000        |
| 2         | Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang Bersifat Tematik dan Selektif Khusus Program Prioritas Presiden | Rp 47.968.000         |
| <b>B</b>  | <b>Pencegahan Maladministrasi</b>                                                                                                  |                       |
| 1         | Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah                                                                | Rp 237.523.000        |
| <b>II</b> | <b>Dukungan Manajemen</b>                                                                                                          |                       |
| <b>A</b>  | <b>Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan</b>                                                                      |                       |
| 1         | Layanan Perkantoran                                                                                                                | Rp 416.499.000        |
|           | <b>Total</b>                                                                                                                       | <b>Rp 932.820.000</b> |

KETUA  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

Kendari, Januari 2026  
KEPALA PERWAKILAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Mastur Susilo



**DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

| Sasaran                                                            | Indikator Kinerja                                                             | Target      | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sumber Data | Cara Mengukur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif | Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan | 181 Laporan | Merupakan keluaran atas kegiatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.<br>Laporan yang dimaksud adalah laporan masyarakat yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 di tahap PVL yang tidak memenuhi syarat materil (tidak termasuk penutupan karena tidak memenuhi syarat formil) dan tahap pemeriksaan.<br>Laporan yang diselesaikan merupakan penyelesaian (penutupan) laporan yang ditangani pada tahun | Data SIMPeL | Dihitung dengan menjumlahkan seluruh laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 (laporan yang diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i> ).<br><br>$\sum LMS = LMS_1 + LMS_2 + \dots + LMS_n$ <p><math>\sum LMS</math> : Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (ditutup)</p> <p>LMS : Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (ditutup) pada tahun 2026 (laporan yang</p> |

| Sasaran                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                     | Target               | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sumber Data                   | Cara Mengukur                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                      | 2026 (laporan yang diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i> ).                                                                                                                                                                                          |                               | diterima pada tahun 2026 dan laporan register tahun sebelumnya yang belum ditutup/ <i>backlog</i> .                                                                                                           |
|                                                                                  | Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik | 1 Laporan            | Merupakan keluaran atas kegiatan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Laporan yang dimaksud adalah laporan pengawasan Ombudsman melalui investigasi atas prakarsa sendiri pada tahun 2026 bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik. | Laporan IAPS                  | Dihitung berdasarkan jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) pada tahun 2026 bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik |
| Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik | Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik                                                                                          | 18 Pemerintah Daerah | Merupakan keluaran atas kegiatan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah.                                                                                                                                                                                               | Laporan Hasil Penilaian Opini | Dihitung dengan menjumlah seluruh Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menjadi lokus penilaian opini  |

| Sasaran                                                                   | Indikator Kinerja                                              | Target    | Deskripsi                                                                                                                                 | Sumber Data                                                 | Cara Mengukur                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                |           | Pemerintah Daerah yang dinilai meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menjadi lokus penilaian opini.                      |                                                             | $\sum PDOP = PDOP_1 + PDOP_2 + \dots + PDOP_n$<br>$\sum PDOP$ : Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik<br>$PDOP$ : Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik |
| Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas | Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor | 1 Layanan | Merupakan keluaran atas kegiatan layanan perkantoran untuk memastikan operasional dan pemeliharaan kantor dapat terpenuhi selama 1 tahun. | Data penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor | Dihitung berdasarkan layanan operasional dan pemeliharaan kantor perwakilan yang diberikan                                                                                                                                                                     |